

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Provinsi Riau (Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau)

by :

*Liza Rahayu
Kennedy
Yuneita Anisma*

*Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru Indonesia
e-mail : lizarahayusanz@gmail.com*

*The Impact of Human Resources Competence, the Appliance of Public Accounting System, and the Appliance of Public Accounting Standar toward the Public Financial Statement Quality at Riau Province Government
(Empirical Study at Department in Riau Province)*

ABSTRACT

This study aims are to analyze empiricly the impact of competence, Public Accounting System, and Public Accounting Standar partially to the Public Financial Statement Quality at Riau Province Government. The population of this research are 39 work unit i.e. Riau Province Secretary, Riau Provinsi Secretary Council, and others units, to analyzed the data is use multiple regression method.

The result of this study are competence, Public Accounting System, and Public Accounting Standar have a significant effect to the Public Financial Statement Quality, it can be seen by the t-test > t tabel.

Keyword: Competence, Public Accounting System, Public Accounting Standar Public Financial Statement Quality

A. PENDAHULUAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu :

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dari berbagai tulisan yang berhasil di-download dari internet, ternyata di dalam laporan keuangan pemerintah masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai. Selain itu juga

masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah.

Masih banyaknya fenomena laporan keuangan pemerintah yang belum menyajikan data-data yang sesuai dengan peraturan dan masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah membuat tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance government*) meningkat. Hal itu juga yang telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik.

Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, dan Dapat dipahami.

Selain itu, hal yang mendasar mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah manfaat Penerapan Sistem Akuntansi Daerah berdasarkan standart akuntansi pemerintahan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelola keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah. Penerapan Akuntansi di dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah salah satunya adalah Sistem Akuntansi. Sebagaimana pengertian dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yaitu serangkaian

prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri No. 59 Tahun 2007).

Laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD harus disusun atau dihasilkan dari sebuah sistem akuntansi pemerintah daerah yang handal, yang bisa dikerjakan secara manual ataupun menggunakan aplikasi komputer. Namun mengingat sumber daya manusia yang masih sangat minim yang berspesialisasi di bidang akuntansi khususnya akuntansi keuangan sektor publik maka akan lebih tepat jika menggunakan sistem aplikasi komputer yang komprehensif dan sudah teruji. Hal ini akan dapat meminimalkan kesalahan proses akuntansi dan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan (Fajar, 2011: 3). Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan laporan keuangan yang diperlukan publik secara akurat, relevan, dan tepat waktu. Hal ini sesuai dengan apa yang ditegaskan oleh Mardiasmo (2004) bahwa untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal.

Pemerintah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan mempunyai pilihan dua basis, yaitu SAP berbasis akrual dan SAP berbasis kas menuju akrual. Penerapan SAP berbasis akrual dalam lingkungan pemerintahan adalah untuk mengetahui seberapa besarnya biaya yang diperlukan untuk menghasilkan pelayanan untuk kepentingan publik, serta menentukan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Dengan adanya SAP berbasis akrual ini dapat menghasilkan informasi

keuangan berupa laporan keuangan pemerintah daerah yang bersifat relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami untuk pengambilan suatu keputusan baik ekonomi, sosial, maupun politik.

Suatu pemerintahan yang menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan akan menghasilkan laporan keuangan yang sangat diperlukan dalam lingkungan pemerintahan. Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan diharapkan agar semuanya berjalan dengan terstruktur dan sesuai dengan pedoman yang berlaku sehingga akan dihasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan akurat terutama laporan keuangan yang keberadaannya sangat penting dan dibutuhkan untuk dipertanggungjawabannya.

Oleh karena itu dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah harus menerapkan dan mempraktekkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dalam rangka membentuk suatu tata pemerintahan yang baik (Good Governance).

Penelitian ini Replikasi dari Penelitian Devi Roviyantie (2013) dengan menambahkan satu variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari penelitian Riani Nurhayati (2013) serta mengganti sampel atau objek penelitian pada SKPD Provinsi Riau. Alasan penulis mengangkat judul ini kembali selain untuk menguji kembali konsistensi hasil penelitian terdahulu juga untuk mengembangkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: untuk memberikan bukti empiris bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pada Perangkat SKPD, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Perangkat SKPD, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

(SAP) pada Perangkat SKPD secara parsial berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Provinsi Riau.

B. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada SKPD

Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes).

Oleh karena itu, jika Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) tidak sesuai dengan pendidikannya diluar akuntansi, maka akan berdampak terhadap Kualitas laporan keuangan daerah. Sehingga, kualitas laporan keuangan tersebut menjadi tidak akurat karena tidak dikelola oleh SDM yang berlatar belakang pendidikan akuntansi. Untuk kedepannya agar kualitas laporan keuangan daerah tersebut menjadi lebih akurat, efektif, dan efisien harus ditata ulang kembali manajemennya dengan SDM yang ahli dalam bidangnya yaitu lebih mengutamakan aparat-aparat pemerintah yg berlatar belakang pendidikan akuntansi.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Devi Roviyantie (2013) dengan judul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Dimana hasil penelitiannya, bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia

sangat dibutuhkan dalam kualitas laporan keuangan daerah.

2. Pengaruh Penerepan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno, 2008).

Harus disadari bahwa terdapat banyak pihak yang akan mengandalkan informasi laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu informasi dalam laporan keuangan harus berkualitas, informasi dalam laporan keuangan yang akan dipublikasikan tersebut harus disajikan secara wajar terbebas dari salah saji yang material sehingga tidak menyesatkan para penggunanya, laporan keuangan hanya akan bermanfaat jika laporan keuangan yang diinformasikan disajikan dengan valid dan dapat diandalkan. Jika laporan keuangan yang dipublikasikan buruk, artinya laporan keuangan tersebut dihasilkan dari sistem akuntansi yang buruk sehingga didalamnya mengandung kesalahan yang material dalam penyajian, tidak disusun sesuai dengan standar pelaporan, dan tidak tepat waktu dalam penyampainnya maka hal itu akan berdampak buruk bagi para pengguna laporan dan pihak penyaji laporan itu sendiri, (Mahmudi, 2010: 9).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Tutun Hermawanto Botutihe (2013) dengan judul Pengaruh Penerepan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kota Gorontalo. Dimana hasil penelitiannya, bahwa dengan penerapan sistem akuntansi

keuangan daerah yang baik maka akan berdampak terhadap kualitas laporan keuangan daerah yang baik pula atau sebaliknya.

3. Pengaruh Penerepan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, Standar akuntansi pemerintahan diartikan sebagai prinsip-prinsip akuntansi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), serta disusun dengan mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

Suatu pemerintahan yang menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan akan menghasilkan laporan keuangan yang sangat diperlukan dalam lingkungan pemerintahan. Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan diharapkan agar semuanya berjalan dengan terstruktur dan sesuai dengan pedoman yang berlaku sehingga akan dihasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan akurat terutama laporan keuangan yang keberadaannya sangat penting dan dibutuhkan untuk dipertanggung jawabannya.

Oleh karena itu dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah harus menerapkan dan mempraktekkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dalam rangka membentuk suatu tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riani Nurhayati (2013) dengan judul pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Dimana hasil penelitiannya, bahwa dengan penerapan SAP maka akan

menjadi pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dalam rangka untuk membentuk suatu tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

C. METODOLOGI PENELITIAN

1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. SKPD di Provinsi Riau berjumlah 39 yang terdiri dari 1 Sekretariat Daerah Provinsi Riau, 1 Sekretariat DPRD Provinsi Riau, 1 Sekretariat KOPRI Provinsi Riau, 1 Inspektorat Provinsi Riau, 1 Satuan Polisi Pamong Praja, 2 Rumah Sakit (RSUD dan RSJ), 14 Badan, dan 17 Dinas. Untuk penelitian ini hanya akan dilakukan di Dinas dan Badan lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Alasan penulis memilih Dinas dan Badan untuk mempersempit ruang lingkup karena keterbatasan waktu, tenaga, pikiran dan dana. Responden dari penelitian ini adalah pejabat eselon III dan IV di Dinas dan Badan Provinsi Riau. Pejabat eselon III dan IV dipilih sebagai responden dengan alasan untuk melihat kinerja manajerial dalam kualitas laporan keuangan daerah. Untuk menentukan jumlah responden dari sampel dalam penelitian ini, penulis menggunakan rumus Slovin. Jadi, jika dimasukkan kedalam rumus Slovin maka didapat jumlah sampel sebagai berikut:

$n = \frac{85,97}{\sqrt{1 + 85,97}}$ maka dibulatkan menjadi 86 orang.

Masing-masing Dinas dan Badan diambil sampel secara proporsional

2. Jenis dan sumber data

Sumber data penelitian ini adalah data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber ahli. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data ini

diperoleh dari hasil jawaban para responden atas kuesioner yang diajukan dimana responden diperkenankan memberikan jawaban yang dianggap paling sesuai dan telah diisi oleh sampel-sampel. Sumber data penelitian ini adalah skor total yang diperoleh dari pengisian kuisisioner yang telah dikirim kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lebih spesifiknya ke Dinas dan Badan di lingkungan pemerintah Provinsi Riau.

3. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen adalah Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Sedangkan variabel dependen adalah Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Untuk lebih jelas, masing-masing variabel dijelaskan sebagai berikut :

3.1. Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)

Variabel dependen dalam Penelitian ini adalah Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Laporan Keuangan daerah merupakan melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan dalam suatu Laporan Keuangan. Menurut Halim (2002), laporan Keuangan Daerah merupakan informasi yang memuat data berbagai elemen struktur kekayaan dan struktur finansial yang merupakan pencerminan hasil aktivitas tertentu. Istilah "Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" meliputi semua laporan dan berbagai penjelasannya yang mengakui laporannya tersebut akan diakui sebagai bagian dari laporan keuangan.

Variabel ini diukur dengan skala likert 1-5 yaitu mengukur sikap dengan mengatakan setuju atau tidak setuju

terhadap pertanyaan yang diajukan dengan skor 5 (SS= Sangat Setuju), skor 4 (S= Setuju), skor 3 (N= Netral), skor 2 (TS= Tidak Setuju), dan skor 1 (STS= Sangat Tidak Setuju).

3.2. Kompetensi Sumber Daya Manusia (X₁)

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan peranannya sebagai manusia yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Kompetensi menurut *Guy et al.* (2002) adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas.

Variabel ini diukur dengan skala likert 1-5 yaitu mengukur sikap dengan mengatakan setuju terhadap pertanyaan yang diajukan dengan skor 5 (STA=Sangat Tidak Ada), skor 4 (TA=Tidak Ada), skor 3 (TT=Tidak Tahu), skor 2 (A= Ada), dan skor 1 (SA = Sangat Ada).

3.3. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X₂)

Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) Departemen Keuangan RI (2001:1), Sistem akuntansi keuangan secara sederhana adalah suatu sistem informasi yang menggabungkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, pelaporan data yang berkaitan dengan keuangan dari suatu entitas sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Variabel ini diukur dengan skala likert 1-5 yaitu mengukur sikap dengan mengatakan setuju atau tidak setuju terhadap pertanyaan yang diajukan dengan skor 5 (SS = Sangat Setuju), skor 4 (S =

Setuju), skor 3 (N = Netral), skor 2 (TS= Tidak Setuju), dan skor 1 (STS = Sangat Tidak Setuju)

3.4. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X₃)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, Standar akuntansi pemerintahan diartikan sebagai prinsip-prinsip akuntansi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), serta disusun dengan mengacu kepada Kerangka Konseptual

Variabel ini diukur dengan skala likert yaitu mengukur sikap dengan mengatakan setuju atau tidak setuju terhadap pertanyaan yang diajukan dengan skor 5 (SS = Sangat Setuju), skor 4 (S = Setuju), skor 3 (N = Netral), skor 2 (TS = Tidak Setuju), dan skor 1 (STS = Sangat Tidak Setuju)

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda (*multiple regression*) dengan bantuan komputer melalui program SPSS 19.0 for Windows. Menurut Sugiyono (2012) regresi berganda adalah banyak faktor dipengaruhi lebih dari satu variabel yang dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen.

Bentuk umum persamaan regresi dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

a = Konstanta

b_{1,2,3} = Koefisien Regresi Parsial

e = Variabel Pengganggu (error)

X₁ = Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

X₂ = Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

X₃ = Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Y = Kualitas Laporan Keuangan Daerah

1. Uji Kualitas data

a. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu instrument alat ukur telah menjalankan fungsi ukurnya (Wijaya, 2011). Validitas menunjukkan ketepatan dan kecermatan alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya suatu skala pengukuran disebut valid bila ia melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur (Sekaran, 2003).

Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan menggunakan rumus *Product Moment Pearson* dengan bantuan program *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) versi 19. Jika nilai r_{hitung} negatif atau kecil dari r_{tabel} , maka nomor item tersebut tidak valid, sebaliknya jika nilai r_{hitung} besar dari r_{tabel} maka item tersebut dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam analisis selanjutnya. Bagi item yang tidak valid, maka item yang memiliki nilai r_{hitung} yang paling kecil dikeluarkan dari analisis, kemudian dilakukan analisis yang sama sampai semua item dinyatakan valid.

b. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas adalah berkaitan dengan masalah adanya kepercayaan terhadap instrument. Suatu instrument dapat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi (konsisten) jika hasil dari pengujian instrument tersebut menunjukkan hasil yang tetap. Dengan demikian, masalah reliabilitas instrument berhubungan dengan masalah ketepatan hasil.

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kestabilan suatu alat ukur. Hasil pengukuran dapat dipercaya apabila digunakan dalam beberapa kali pengukuran terhadap kelompok subyek yang sama diperoleh hasil relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subyek tidak berubah.

2. Uji Asumsi Klasik

2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang berdistribusi normal. Analisis data mensyaratkan data berdistribusi normal untuk menghindari bias dalam analisis data. Grafik normal pola menunjukkan penyebaran titik-titik di sekitar garis diagonal, dan mengikuti arah garis diagonal mengindikasikan model regresi memenuhi asumsi normalitas.

2.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas merupakan uji yang ditujukan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (variabel independen). Model uji regresi yang baik selayaknya tidak terjadi multikolinieritas. Menganalisis korelasi antar variabel bebas. Jika antar variabel bebas ada korelasi yang cukup tinggi (diatas 0,90) maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinieritas. Multikolinieritas dapat juga dilihat dari VIF, jika $VIF < 10$ maka tingkat kolinieritas dapat ditoleransi.

2.3. Uji Heteroskedastisitas

Untuk memenuhi asumsi heterokedastisitas, maka perlu diuji apakah ada gejala heterokedastisitas atau tidak. Dalam penelitian ini, pengujian akan dilakukan dengan dilihat melalui pola diagram pencar (*Scatterplot*). Jika *Scatterplot* membentuk pola tertentu yang jelas maka regresi mengalami gangguan heterokedastisitas. Sebaliknya jika *Scatterplot* tidak membentuk pola tertentu (menyebar) maka regresi tidak mengalami gangguan heterokedastisitas.

3. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan uji t. Uji t digunakan untuk mengetahui apakah

variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (Prayitno, 2012). Kriteria pengujian untuk uji t adalah:

- a. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak, dengan kata lain bahwa variabel independen secara individual memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_a ditolak dan H_0 diterima, dengan kata lain bahwa variabel independen secara individual tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

Dalam pengujian hipotesis ini, uji t digunakan untuk menguji atau membandingkan rata-rata nilai suatu sampel dengan nilai lainnya. Pengujian ini dilakukan dengan tingkat keyakinan 95% dengan tingkat signifikansi alfa (α) sebesar 5% dan *degree of freedom* (df) = n-k. Penelitian ini mempunyai tiga hipotesis yang diuji dengan menggunakan analisis regresi linier berganda.

4. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) adalah sebuah koefisien yang menunjukkan persentase pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Persentase tersebut menunjukkan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependennya (Imam Ghazali, 2006). Semakin besar koefisien determinasi, semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya. Dengan demikian regresi yang dihasilkan baik untuk mengestimasi nilai variabel dependen. Untuk menghitung besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat dari koefisien korelasi parsialnya. Dan untuk mengetahui besarnya koefisien determinasi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat dari hasil kuadrat koefisien korelasi parsial.

D.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Analisis Deskriptif

1.1. Pengembalian Kuisisioner

Kuisisioner diberikan kepada 32 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru. Masing-masing SKPD diberikan tiga kuisisioner kepada bagian keuangan. Jumlah kuisisioner yang diisi dan dikembalikan sebanyak 86 buah dengan tingkat respon 76,79%. Semua total kuisisioner dapat digunakan karena telah sesuai dengan yang diinginkan penulis. Tingkat pengembalian kuisisioner dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1. Jumlah sampel dan Tingkat pengembalian kuisisioner

Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
Kuisisioner yang disebar	112	100%
Kuisisioner yang tidak kembali	(24)	21,43
Kuisisioner yang tidak dapat dianalisis	(2)	1,79
Kuisisioner yang dapat dianalisis	86	76,79

Sumber: Data olahan

1.2. Analisis Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan peranannya sebagai manusia yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Tanggapan responden mengenai kompetensi SDM dalam di kota Pekanbaru dapat dilihat responden penelitian yang memiliki tanggapan kompetensi SDM adalah Ada (A) yakni sebanyak 39 orang atau 45,30%, Sangat Ada (SA) sebanyak 12 orang atau 13,95% orang, Tidak Tahu (TT) sebanyak 33 orang atau 38,40. Hal ini menunjukkan bahwa menurut responden kompetensi

SDM di kota Pekanbaru berada pada taraf baik dimana mereka dalam bekerja telah memiliki keterampilan, pengalaman dan pengetahuan yang baik. Hal ini sesuai dengan pendapat Siagian (2010:112) bahwa kompetensi SDM yang baik adalah apabila dalam bekerja karyawan memiliki keterampilan, pengalaman kerja dan pengetahuan yang baik tentang tugas dan pekerjaan yang harus dijalankan.

1.3. Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Tanggapan responden mengenai Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di kota Pekanbaru dapat dilihat responden penelitian yang memiliki tanggapan sangat pernah (SP) yakni sebanyak 1 orang atau 1,16%, Pernah (P) 14 orang atau 16,28%, yang menyatakan Tidak Tahu (TT) sebanyak 27 orang atau 31,40%, Tidak Pernah (TP) sebanyak 40 orang atau 46,51% dan Sangat Tidak Pernah (STP) sebanyak 4 orang atau 4,65%. Hal ini menunjukkan bahwa menurut responden Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di kota Pekanbaru setuju untuk diterapkan yang meliputi proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, pelaporan data yang berkaitan dengan keuangan dari suatu entitas sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan.

1.4 Analisis Standar Akuntansi Pemerintah

Tanggapan responden mengenai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di kota Pekanbaru dapat dilihat responden penelitian yang memiliki tanggapan Setuju (S) yakni sebanyak 8 orang atau 9,30%, yang menyatakan Netral (N) sebanyak 25 orang atau 29,07%, yang menyatakan Kurang Setuju (KS) sebanyak 43 orang atau 50%, dan Sangat Tidak Setuju (STS) sebanyak 9 orang atau 10,47%.

Hal ini menunjukkan bahwa menurut

responden, SAP di kota Pekanbaru belum diterapkan dengan tepat. Penerapan SAP berbasis akrual dalam lingkungan pemerintahan adalah untuk mengetahui seberapa besarnya biaya yang diperlukan untuk menghasilkan pelayanan untuk kepentingan publik, serta menentukan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Dengan adanya SAP berbasis akrual ini dapat menghasilkan informasi keuangan berupa laporan keuangan pemerintah daerah yang bersifat relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami untuk pengambilan suatu keputusan baik ekonomi, sosial, maupun politik.

1.5. Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Tanggapan responden mengenai kualitas laporan keuangan daerah kota Pekanbaru dapat dilihat responden penelitian yang memiliki tanggapan Setuju (S) yakni sebanyak 11 orang atau 12,79%, yang menyatakan Netral (N) sebanyak 41 orang atau 47,67%, dan Tidak Setuju (TS) sebanyak 29 orang atau 33,72% sementara yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS) sebanyak 5 orang atau 5,81%. Maka dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan daerah kota Pekanbaru, dapat dikatakan responden menyatakan netral dengan kualitas laporan keuangan daerah yang dibuat Pemko Pekanbaru selama ini.

2. Hasil Pengujian Kualitas Data

2.1. Hasil Uji Validitas

Ke enam pertanyaan yang diajukan dalam variabel kompetensi SDM (X_1) semuanya memiliki r hitung $>$ r tabel. Dengan demikian semua butir pertanyaan variabel kompetensi SDM adalah valid.

b. Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_2)

Sembilan belas pertanyaan yang diajukan dalam variabel sistem akuntansi keuangan daerah (X_2) semuanya memiliki

r hitung > r tabel. Dengan demikian semua butir pertanyaan variabel sistem akuntansi keuangan daerah adalah valid.

c. Variabel Standar Akuntansi Pemerintahan (X_3)

Kelima belas pertanyaan yang diajukan dalam variabel SAP (X_3) semuanya memiliki r hitung > r tabel. Dengan demikian tidak semua butir pertanyaan variabel kompetensi SDM adalah valid sehingga pertanyaan layak dipergunakan lagi dalam penelitian ini.

d. Variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)

Kesebelas pertanyaan yang diajukan dalam variabel kualitas laporan keuangan daerah (Y) semuanya memiliki r hitung > r tabel. Dengan demikian semua butir pertanyaan variabel kualitas laporan keuangan daerah adalah valid.

2.2. Hasil Uji Reliabilitas

Pengujian realibitas atau keandalan instrument dilakukan dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach. Hasil pengujian reliabilitas dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach dari faktor kompetensi SDM, standar akuntansi keuangan daerah, standar akuntansi pemerintah serta kualitas laporan keuangan didapatkan harga Koefisien Alpha yang lebih besar dari nilai kritis 0,6 sehingga dapat dikatakan bahwa instrumen yang digunakan untuk pengambilan data adalah reliable/andal. Hal ini karena nilai korelasi (r) lebih tinggi dari nilai r kritis yaitu 0,600 sehingga data yang diperoleh reliabel.

2.3. Hasil Uji Normalitas

Digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi yang normal. Berdasarkan uji normalitas, maka dapat dilihat bahwa nilai signifikansi untuk masing-masing variabel memiliki nilai >

0.05 dengan demikian seluruh variabel berdistribusi normal.

2.4. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji pendahuluan dilakukan guna menguji apakah model regresi linear berganda dapat diterima secara ekonometrik. Syarat memenuhi uji pendahuluan ini adalah data harus bebas dari *autokorelasi*, *heteroskedastisitas*, dan *multikoleniaritas*.

a. Hasil Uji Autokorelasi

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah ada masalah *autokorelasi* pada persamaan regresi linear berganda. Pengujian dilakukan melalui uji Durbin Watson. Dari hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS diperoleh nilai d hitung sebesar = 1,1166, sedangkan batasan nilai DW berada, pada -2 sampai +2. Untuk itu diputuskan bahwa model ini telah terbebas dari kemungkinan adanya autokorelasi.

b. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Pengujian terhadap heteroskedastisitas dilakukan dengan mengamati gambar scatter plot. Heteroskedastisitas tidak terjadi jika data terpecah disekitar angka nol pada sumbu Y dan tidak membentuk suatu pola/trend garis tertentu. Dari gambar uji heteroskedastisitas, terlihat sebaran data dan tidak tampak adanya suatu pola tertentu pada sebaran data tersebut. Maka dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

c. Hasil Uji Multikoleniaritas

Uji *multikoleniaritas* dihitung melalui program SPSS dan hasilnya nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikoleniaritas pada model regresi linear berganda yang dibuat karena nilai VIF yang ada mempunyai nilai di atas angka 1 sehingga tidak melebihi batas VIF yaitu 10 dan tolerance 0,1.

3. Hasil Uji Hipotesis

3.1. Hasil Uji Parsial

Berdasarkan hasil perhitungan maka didapatkan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 0,071 + 0,210 X_1 + 0,404 X_2 + 0,342X_3 + e$$

Berdasarkan persamaan di atas maka kompetensi SDM memiliki tingkat pengaruh sebesar 0,210, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) sebesar 0,404, Sistem Akuntansi Pemerintahan sebesar 0,342. Artinya jika kompetensi SDM berubah sebesar 1 satuan misalnya, dan variabel lain nilainya tetap (konstan), maka kualitas laporan keuangan daerah akan meningkat sebesar 0,210 satuan. Model regresi ini mempunyai konstanta sebesar 0,071, yang artinya jika kompetensi SDM, system akuntansi keuangan daerah, standar akuntansi pemerintah memiliki nilai nol (konstan) maka kualitas laporan keuangan daerah akan meningkat sebesar 0,071 satuan.

Untuk menguji signifikansi koefisien regresi digunakan uji-t, sesuai dengan hipotesis yang telah diajukan sebelumnya maka diperoleh hasil pengujian sebagai berikut :

1. Pengujian Hipotesis Pertama (H_1)

Dari hasil pengolahan data menunjukkan bahwa t hitung variabel kompetensi SDM adalah 2,286 dan t tabel adalah 2,002 sehingga diperoleh kesimpulan t hitung > t tabel dan P value < α , maka H_1 diterima. Sementara itu tingkat signifikansi sebesar 0,025 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti kompetensi SDM memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah kota Pekanbaru. Sehingga hipotesis pertama (H_1) dapat dibuktikan.

Diterimanya hipotesis ini disebabkan kompetensi SDM pada suatu instansi dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Kompetensi SDM merupakan seluruh kemampuan yang

dimiliki seorang pegawai dalam pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, perlengkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan.

Jika Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) tidak sesuai dengan pendidikannya diluar akuntansi, maka akan berdampak terhadap Kualitas laporan keuangan daerah. Sehingga, Kualitas laporan keuangan tersebut menjadi tidak akurat karena tidak dikelola oleh SDM yang berlatar belakang pendidikan akuntansi. Untuk kedepannya agar kualitas laporan keuangan daerah tersebut menjadi lebih akurat, efektif, dan efisien harus ditata ulang kembali manajemennya dengan SDM yang ahli dalam bidangnya yaitu lebih mengutamakan aparat-aparat pemerintah yg berlatar belakang pendidikan akuntansi.

Namun dalam penelitian ini kompetensi ternyata berpengaruh signifikan dalam peningkatan kualitas laporan keuangan daerah, hal ini tidak sejalan dengan penelitian Saputra (2010) yang menyatakan bahwa kompetensi pegawai tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Soleman (2007), yang meneliti pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan daerah dan menyimpulkan bahwa kompetensi pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

2. Pengujian Hipotesis Kedua (H_2)

Dari hasil pengolahan data menunjukkan bahwa t hitung variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah 3,408 dan t tabel adalah 2,002 sehingga diperoleh kesimpulan t hitung > t tabel dan P value < α , maka H_0 ditolak dan H_2 diterima. Sementara itu tingkat signifikansi sebesar 0,001 < 0,05. Hal ini berarti SAKD memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sehingga hipotesis kedua (H_2) dapat dibuktikan.

Diterimanya hipotesis ini disebabkan SAKD pada suatu instansi memiliki peranan penting dalam menjamin tersedianya laporan keuangan daerah yang valid. Hal ini juga berarti bahwa keberhasilan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah tergantung pada penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang digunakan. Menurut Halim (2005:18) sistem akuntansi keuangan daerah memberikan peran utama di dalam organisasi, yaitu untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, komunikasi, kolaborasi, dan kompetitif dan akuntabilitas laporan keuangan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni dan Subaweh (2008) yang menyatakan bahwa SAKD berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Begitu juga penelitian Adhi dan Soehadjo (2013) yang menyatakan bahwa SAKD sangat berperan dalam peningkatan kualitas laporan keuangan daerah.

3. Pengujian Hipotesis Ketiga (H_3)

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa t hitung variabel sistem akuntansi pemerintah adalah 2,486 dan t tabel adalah 2,002 sehingga diperoleh kesimpulan t hitung $>$ t table dan P value $<$ α , maka H_0 ditolak dan H_3 diterima. Sementara itu tingkat signifikansi sebesar 0,015 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti SAP memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sehingga hipotesis ketiga (H_3) dapat dibuktikan atau dengan kata lain H_3 diterima.

Diterimanya hipotesis ini disebabkan SAP pada suatu instansi berperan dalam peningkatan kualitas laporan keuangan daerah kota Pekanbaru. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni dan Subaweh (2008) yang menyatakan bahwa SAP berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas laporan

keuangan daerah. Begitu juga penelitian Adhi dan Soehadjo (2013) yang menyatakan bahwa SAP sangat berperan dalam peningkatan kualitas laporan keuangan daerah.

3.2. Hasil Uji F

Dari hasil pengolahan data menunjukkan bahwa F hitung variabel kompetensi SDM, sistem akuntansi keuangan daerah, standar akuntansi pemerintah) terhadap kualitas laporan keuangan daerah adalah 187,689 dan F tabel adalah 2,520 sehingga diperoleh kesimpulan F hitung $>$ F tabel maka H_0 ditolak dan H_4 diterima. Sementara itu tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti ketiga variabel secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sehingga hipotesis dapat dibuktikan atau dengan kata lain H_4 diterima.

3.3. Hasil Uji Koefisien Determinasi ($Adj. R^2$)

Persamaan dalam penelitian ini menggunakan variabel independen lebih dari satu, maka nilai koefisien determinasi yang digunakan adalah *Adjusted R Square*. Tingkat koefisien determinasi yang diperoleh adalah sebesar $Adj. R^2 = 0,868$. Hal ini berarti kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Pekanbaru dipengaruhi oleh variabel kompetensi SDM, system akuntansi keuangan daerah, standar akuntansi pemerintah sebesar 86,80%. Sementara sekitar 13,20% dipengaruhi oleh variabel lain. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel kualitas laporan keuangan dipengaruhi kompetensi SDM, system akuntansi keuangan daerah, standar akuntansi pemerintah. Tingkat $Adj. R^2$ yang diperoleh tergolong tinggi, hal ini disebabkan karena dari 3 variabel yang diteliti ternyata seluruh variabel berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, selain itu

pengaruh masing-masing variabel independen juga tergolong tinggi. Variabel yang paling dominan adalah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) sebesar 0,404 disusul kemudian Sistem Akuntansi Pemerintahan sebesar 0,342.

4. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa variabel kompetensi SDM (X_1), Standar Akuntansi Keuangan Daerah/SAKD (X_2) dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah kota Pekanbaru. Pengaruh variabel kompetensi SDM (X_1), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah/SAKD (X_2) dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah kota Pekanbaru adalah sebesar 0,868 atau 86,80%. Sedangkan sisanya sebesar 13,20% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Tingginya pengaruh ketiga variabel tersebut karena dari tiga variabel yang diteliti ketiga variabel berpengaruh kuat terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah kota Pekanbaru.

1. Kompetensi SDM

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kompetensi SDM (X_1) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah kota Pekanbaru. Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yaitu Penelitian ini sejalan dengan penelitian Soleman (2007) yang juga menunjukkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah/SAKD (X_2) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah kota Pekanbaru. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni dan Subaweh (2008) yang menyatakan

bahwa SAKD berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Begitu juga penelitian Adhi dan Soehadjo (2013) yang menyatakan bahwa SAKD sangat berperan dalam peningkatan kualitas laporan keuangan daerah.

3. Standar Akuntansi Pemerintah

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (X_3) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah kota Pekanbaru. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni dan Subaweh (2008) yang menyatakan bahwa SAP berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Begitu juga penelitian Adhi dan Soehadjo (2013) yang menyatakan bahwa SAP sangat berperan dalam peningkatan kualitas laporan keuangan daerah.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

1. Kompetensi SDM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah kota Pekanbaru. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung variabel kompetensi SDM $>$ t tabel.
2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah kota Pekanbaru. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung variabel SAKD $>$ t tabel.
3. Standar Akuntansi Pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah kota Pekanbaru. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung SAP $>$ t tabel.

2. Keterbatasan Penelitian

- a. Dalam penelitian ini, penggunaan kuisioner sebagian besar masih menggunakan kuisioner yang dipakai peneliti sebelumnya, sehingga kemungkinan terjadinya kekeliruan

- dalam pengukurannya karena belum tentu menggambarkan keadaan yang sama pada objek peneliti sebelumnya.
- b. Penelitian ini hanya menggunakan obyek penelitian satuan kerja perangkat daerah dalam satu daerah sehingga belum dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kompetensi SDM, Standar Akuntansi Keuangan Daerah/SAKD dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah kota Pekanbaru.
 - c. Karena memiliki banyak kesibukan dan keterbatasan waktu, responden meminta kuisisionernya ditinggalkan yang berdampak pada peneliti tidak bisa mendampingi responden pada saat menjawab. Akibatnya jawaban yang diberikan belum tentu menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
 - d. Penelitian ini hanya menggunakan variabel kompetensi SDM, Standar Akuntansi Keuangan Daerah/SAKD dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sedangkan masih banyak variabel lain yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah kota Pekanbaru.
- 3. Saran**
- a. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan pengujian dengan menambahkan variabel lain seperti sarana dan prasarana, komitmen pegawai, teknologi informasi, budaya organisasi dan lain sebagainya.
 - b. Setiap satuan kerja hendaknya memiliki sumber daya yang kompeten dalam menjalankan tugas-tugas terutama dalam penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintahan karena berdasarkan hasil penelitian kebanyakan pegawai yang menjadi responden penelitian mengeluhkan masalah kurangnya pemahaman tentang SAKD dan SAP.
 - c. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya membuat kuisisioner yang baru dan disesuaikan dengan kondisi daerah yang diteliti sehingga dapat menggambarkan permasalahan yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- _____1989. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 2, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.
- Bastian, Indra., 2006. Akuntansi Sektor Publik: *Suatu Pengantar*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Daniel Kartika Adhi dan Yohanes Suhardjo (2013) meneliti tentang *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tual)*. Jurnal STIE Semarang, Vol 5, No 3, Edisi Oktober 2013 (ISSN : 2252-7826).
- Devie Roviyantie (2013) dengan judul *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) , Penerepan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. Jurnal Ekonomi Akuntansi, Universitas Sliwangi Tasikmalaya.
- Kepmendagri No 29 Tahun 2002 tentang *Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah*.
- Keputusan Kepala BKN No 46A Tahun 2007 tentang *Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negri Sipil*.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi*

- Pemerintahan*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Pemerintah RI, 2000. Peraturan Pemerintah Nomor 101/2000 tentang *Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai*.
- Pemerintah RI, 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24/2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No.01 Tahun 2007 tentang *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*.
- Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2008 Tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Peraturan Pemerintah No 105 Tahun 2000 tentang *Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Permendagri No 59 Tahun 2007 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Purwaniati Nugraheni dan Imam Subaweh (2008) dengan judul *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. Jurnal Ekonomi Bisnis No.01 Vol.13, April 2008.
- Republik Indonesia, 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*.
- Republik Indonesia, 2004. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Negara*.
- Republik Indonesia, 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia, 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Riani Nurhayati (2013) dengan judul *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. Jurnal Ekonomi Akuntansi, Universitas Siliwangi Tasikmalaya.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2007. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2011. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Tutun Hermawanto Botutihe (2013) dengan judul *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kota Gorontalo*. Jurnal Ekonomi Akuntansi, Universitas Negeri Gorontalo.
- UU No 22 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan UU No 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.
- UU No 25 tahun 1999 yang telah direvisi UU No 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- UU No. 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*, Pasal 31.
- UU No 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Vicky Agustawan Lasoma (2013) dengan judul *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara*. Jurnal Ekonomi Akuntansi, Universitas Negeri Gorontalo.
- Warren, Carl. S, James M. Reeve, Phillip E. Fess, 2005. *Pengantar Akuntansi*, Edisi 21, Penerjemah Aria Farahmita, Amanugrahani, Taufik Hendrawan, Penerbit Salemba Empat, Jakarta